

Analysis of the Young Generation's Understanding of Pancasila as the Ethics of National and State Life

Journal of Creativity Student

2021, Vol. 6(2) 151-166

© The Author(s) 2021

DOI: **10.15294/jcs.v7i2.38493**

This journal has been accredited by

Ministry of Education, Culture,

Research & Technology of Republic

Indonesia (**Rank SINTA 5**).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of **Creative Common Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**

Anggi Weffani

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

anggiweffani@students.unnes.ac.id

Waspiah Waspiah

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

waspiah@mail.unnes.ac.id

History of Manuscript

Submitted : February 21, 2021

Revised 1 : March 12, 2021

Revised 2 : April 17, 2021

Accepted : June 11, 2021

Online since : July 30, 2021

Abstract

Every nation has ethics and norms in carrying out its activities. The ethics of national life is formulated with the aim of becoming a basic reference for improving the quality of human beings who are faithful, pious and have noble character and have Indonesian personalities in the life of the nation. However, how far has the understanding of the younger generation in understanding the ethics of national and state life gone? Pancasila must be maintained by all Indonesians as the basis of the state and ideology because

Pancasila is the life that has been embedded since the birth of the Indonesian nation and state. To foster the value of Pancasila awareness among the younger generation, these are as follows: (1) Pancasila as a view of life and the basis of the state, (2) the ability of the younger generation to adapt to the world, (3) the young generation is able to regulate and maintain and cultivate the value of Pancasila awareness, and (4) the younger generation has a common goal to transform with the community and its leaders.

KEYWORDS

Ethics ▪ Pancasila ▪ Young Generation

A. Pendahuluan

Nilai norma dan moral adalah suatu konsep yang terkait satu sama lain. Dalam keterkaitannya dengan Pancasila maka ketiganya akan memperoleh pemahaman yang saling melengkapi sebagai sistem etika.

Nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praksis atau kehidupannya dalam masyarakat, bangsa dan Negara maka diwujudkan dalam norma-norma yang kemudian menjadi pedoman. Norma-norma itu meliputi : Norma moral : Yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik dan buruk, sopan atau tidak sopan, susila atau tidak susila Norma hukum : Sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu tempat dan waktu tertentu dalam pengertian ini peraturan hukum. Dalam pengertian itulah Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Oleh karena itu, Etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dipahami oleh generasi muda saat ini sebagai calon penerus bangsa yang nantinya akan menggantikan sebagian besar para pemimpin bangsa.

Pancasila hakikatnya bukan merupakan suatu pedoman yang langsung bersifat normatis ataupun praksis, Pancasila merupakan suatu system nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma.

Indonesia nantinya akan dihadapkan dengan berbagai masalah baru berkaitan dengan berkembangnya teknologi dan zaman yang kian maju. Kebersamaan pertumbuhan kualitas negara dengan penerusnya harus dipenuhi dengan hal positif yang mengarah pada bangsa dan negara yang kian maju. Dengan demikian, para penerus bangsa perlu dan wajib memahami Pancasila terlebih dalam hal penerapannya pada etika kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengertian dari etika
2. Pancasila sebagai etika kehidupan berbangsa dan bernegara
3. Pemahaman Pancasila sebagai etika kehidupan berbangsa dan bernegara

C. Tujuan

1. Agar mahasiswa lebih memahami tentang materi Pancasila Sebagai Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
2. Untuk mendorong semangat mahasiswa agar memiliki etika yang sesuai dengan Sila dalam Pancasila.
3. Untuk menambah wawasan mahasiswa tentang Pancasila Sebagai Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
4. Untuk memberi gambaran secara tertulis tentang Pancasila Sebagai Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

D. Analisis & Pembahasan

1. Pengertian Pancasila dan Etika Moral

Pancasila berasal dari dua kata yaitu panca dan sila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya dasar atau peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau senonoh. Jadi, Pancasila adalah lima dasar yang dijadikan acuan dalam bersikap dan bertingkah laku.

Sementara itu, kata etika yang secara etimologis dari kata Yunani *ethos* secara harfiah berarti adat kebiasaan. Watak atau kelakuan manusia. Dalam KBBI, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Pengertian etika bias-bias beragam menurut para ahli, namun dapat diklasifikasikan ke dalam 3 makna (Sudarminta, 1997); makna etika yang pertama adalah sebagai sistem nilai. Kata etika di sini berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan hidup atau sebagai pedoman penilaian baik buruknya perilaku manusia, baik secara individu maupun sosial dalam suatu masyarakat. Makna ini misalnya digunakan dalam etik Jawa, etik Protestan, dan sebagainya. Makna yang kedua adalah kode etik, yang mana merupakan kumpulan norma dan nilai moral yang wajib diperhatikan oleh pemegang profesi tertentu. Menurut Bertens (2000), kata etika dapat diartikan sebanyak 3 jenis :

1. Etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok yang mengatur tingkah lakunya. Hal ini biasa diartikan sebagai sistem nilai yang berfungsi dalam hidup manusia perorangan maupun sosial.
2. Etika diartikan sebagai kumpulan asas dan moral yaitu kode etik.
3. Etika berarti ilmu tentang yang baik atau buruk.

Selain etika, dikenal juga dengan istilah etiket, yang berasal dari bahasa Prancis *etiquette*, etika berarti moral namun etiket adalah sopan santun, dinyatakan bahwa :

1. Etiket menyangkut cara sesuatu perbuatan yang harus dilakukan manusia, sedangkan etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan, etika member norma pada perbuatan itu sendiri.

2. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan, sedangkan etika tidak bergantung pada hadir tidaknya orang lain.
3. Etiket bersifat relative, sedangkan etika bersifat absolute.
4. Etiket berarti memandang manusia hanya dari segi lahiriahnya, sedangkan etikamenyangkutkan manusia dari segi dalam.

Etika sebagai filsafat moral adalah salah satu cabang ilmu yang secara filsafatyang secara khusus mengkaji perilaku manusia dari segi baik buruknya atau benarsalahnya. Secara umum dapat di bedakan dua cabang besar etika:

1. Etika umum adalah etika yang menyajikan beberapa pengertian dasar dan pengaji beberapa permasalahan pokok dalam filsafat moral.
2. Etika khusus adalah etika yang membahas beberapa permasalahan moral dalam bidang bidang khusus.

a. Etika deskriptif

Hanya melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas, misalnya adat kebiasaan suatu kelompok, tanpa memberikan penilaian. Etika deskriptif memelajari moralitasyang terdapat pada kebudayaan tertentu, dalam periode tertentu. Etika ini dijalankanoleh ilmu-ilmu sosial: antropologi, sosiologi, psikologi, dll, jadi termasuk ilmu empiris, bukan filsafat.

b. Etika normatif

Etika yang tidak hanya melukiskan, melainkan melakukan penilaian (preskriptif: memerintahkan). Untuk itu ia mengadakan argumentasi, alasan-alasan mengapasesuatu dianggap baik atau buruk. Etika normatif dibagi menjadi dua, etika umumyang memermasalahkan tema-tema umum, dan etika khusus yang menerapkan prinsip-prinsip etis ke dalam wilayah manusia yang khusus, misalnya masalahkedokteran, penelitian. Etika khusus disebut juga etika terapan.

c. Metaetika

Meta berarti melampaui atau melebihi. Yang dibahas bukanlah moralitas secaralangsung, melainkan ucapan-ucapan kita di

bidang moralitas. Metaetika bergerak pada tataran bahasa, atau mempelajari logika khusus dari ucapan-ucapan etis.

2. Pancasila Sebagai Dasar Etika Pada Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Pancasila sebagai sistem etika memerlukan kajian kritis-rasional terhadap nilai moral yang hidup agar tidak terjebak dalam pandangan yang bersifat mitos. Misalnya korupsi terjadi karena pejabat diberi hadiah oleh seorang yang membutuhkan sehingga urusannya lancar. Dia menerima hadiah tanpa memikirkan alasan orang tersebut memberikan bantuan. Sehingga tidak tahu kalau perbuatannya dikategorikan dalam bentuk suap. Hal yang sangat penting dalam mengembangkan Pancasila sebagai sistem etika meliputi:

1. Menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan penentu sikap, tindakan serta keputusan yang akan diambil setiap warga negara.
2. Pancasila memberikan pedoman bagi setiap warga negara agar memiliki orientasi yang jelas dalam pergaulan regional, nasional dan internasional
3. Pancasila menjadi dasar analisis kebijakan yang dibuat penyelenggara negara sehingga mencerminkan semangat kenegaraan berjiwa Pancasila
4. Pancasila menjadi filter terhadap pluralitas nilai yang berkembang dalam berbagai bidang kehidupan

Seperti telah dijelaskan diatas nilai sila Pancasila ialah suatu metode nilai, maka disini setiap sila memiliki nilai namun sila tersebut berkaitan, bertautan dan terhubung dengan nilai yang lainnya serta memiliki kedudukan yang sama. Menurut Christian Siregar (2014) Pancasila sebenarnya sebagai fondasi bersama bagi setiap komponen untuk menjadi bagian dari masyarakat Indonesia untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi ataupun bersosial. Oleh karena itu pada kaitannya menggunakan nilai etika

ini lah yang tercantum pada pancasila adalah sekumpulan bidang yang di angkat berdasarkan prinsip nilai kehidupan dan berkembang dalam masyarakat. Dalam tingkatan Pancasila menjadi dasar nilai filsafat Negara, maka wajib diuraikan pada suatu kebiasaan yang dimana panduan perwujudan dalam aktivitas sehari-hari. Menurut Sri Rahayu Amri (2018) termuat dua rupa kebiasaan dalam kehidupan masyarakat yaitu norma hukum dan norma moral. Begitu ditemukan menjadi suatu kebiasaan hukum positif, Pancasila harus diuraikan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang kentara, hal itu secara nyata diuraikan pada tertib hukum Indonesia. Akan tetapi, pada perwujudannya pun membutuhkan suatu kebiasaan dan moral yang menjadi dasar pijak perwujudan tertib aturan di Indonesia. Menurut Riska Afrinida (2021) Pancasila kita sedang bertumbuhkandengan pola perilaku kelompok kecil yang dimana tidak lagi reaktif terhadap rakyatnya. Jika ada peraturan perundang-undangan tidak di fondasi menggunakan suatu kebiasaan yang utama pada perwujudan dan penyelenggaraan negara, dengan begitu tentu saja hukum tidak akan sampai pada suatu kesamarataan bagi keberlangsungan kehidupan kemanusiaan. Sehingga bisa saja peraturan ini diterapkan oleh negeri lain yang barangkali lambangnya bukan Pancasila tetapi nama lain. Maka dapat disimpulkan jika suatu Negara tersebut memanfaatkan prinsip dan asas yang berisi bahwa negara dengan berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, dan berkerakyatan, serta berkeadilan, demikian negeri tersebut pada dasarnya memanfaatkan dasar filsafat dari nilai sila Pancasila.

3. Tantangan Penerapan Pancasila Pada Generasi Muda

Semangat persatuan dan kesatuan merupakan bentuk dari semangat Pancasila yang kemudian diterapkan dalam kehidupan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoensia. Pancasila merupakan suatu nilai yang memberikan dasar-dasar yang bersifat Fundamental dan Universal baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan begitu, Pancasila dijadikan pedoman pada generasi muda untuk tetap menjalankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Pesatnya perkembangan ilmu teknologi menjadi] kekhawatiran terbesar dalam perubahan karakter dan juga tingkah laku generasil muda. Generasi milienial atau generasi Y (teori William Straus dan Neil Howe) yang saat ini berumur antara 18–36 tahun, merupakan generasi di usia produktif. Generasi ini akan memainkan peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Generasi muda memiliki semangat produktivitas yang tinggi serta memiliki relasi yang baik antar generasi lainnya. Namun, karena hidup di era yang serba otomatis, generasi ini cenderung menginginkan sesuatu yang serba instan dan sangat mudah dipengaruhi oleh trend dan budaya luar. Hal inilah yang menjadi titik kritis bagi masa depan negara dan bangsa kita. Perkembangan teknologi ternyata masih menjadi hambatan untuk mendekatkan dan menyatukan anak bangsa. Akibat dari tidak seimbangny antara perilaku muda dengan penerapan Pancasila adalah ciri khas bangsa kita, seperti gotong royong yang mulai memudar seiring berjalannya waktu. Hal ini menjadikan generasi muda menjadi manusia yang individualis, serta kurangnya rasa Nasionalisme dan Patriotisme.

Untuk membatasi diri dari pengkisisan jati diri bangsa akibat pesatnya perkembangan teknologi dan upaya-upaya memecah bangsa, maka bangsa ini harus kembali kepada Pancasila. Langkah antisipasi ini dapat dilakukan dengan cara : Pendidikan Agama yang harus menjadi peranan penting untuk membentuk ketakwaan pada diri generasi muda Indonesia, pendidikan Pancasila yang harus ditanamkan sehingga dapat menjadi pedoman dan landasan bagi generasi muda, menumbuhkan kesadaran dalam diri generasi muda Indonesia untuk membangkitkan

semangat Pancasila, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dan keyakinan dengan sebaik-baiknya, menumbuhkan semangat nasionalisme, contohnya mencintai produk dalam negeri, dan yang terakhir adalah lebih selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ekonomi, maupun budaya bangsa

Sosialisasi tentang nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan agar generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa ini tidak lupa dan bisa terus menjaga jati diri Bangsa Indonesia. Mengingat bahwa di era industri 4.0 ini, para generasi millennial akan dituntut untuk berlomba-lomba menciptakan inovasi dan juga berpikiran kreatif sehingga dikhawatirkan banyak remaja akan mulai melupakan jati diri Bangsa Indonesia. Berkembangnya ilmu teknologi menjadi pengaruh terbesar dalam perubahan karakter dan juga tingkah laku generasi muda. Akibat dari perkembangan ilmu teknologi tersebut, pancasila kini sedikit demi sedikit mulai tergerus oleh globalisasi.

Begitu pentingnya Pancasila bagi Negara Indonesia, sebab jika tidak berpedoman pada Pancasila Indonesia akan bubar. Kita juga bisa memulai dari mencintai diri sendiri, keluarga, lingkungan dan negara dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Itu secara tidak langsung dapat mempertahankan keutuhan Pancasila.

4. Alasan Diperlukannya Pancasila Sebagai Sistem Etika

Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur system penyelenggaraan negara. Bayangkan apabila dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak ada sistem etika yang menjadi guidance atau tuntunan bagi para penyelenggara negara, niscaya negara akan hancur. Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia, meliputi hal-hal sebagai berikut:

Pertama, korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan

tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk (good and bad). Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik (good) dan buruk (bad). Archie Bahm dalam *Axiology of Science*, menjelaskan bahwa baik dan buruk merupakan dua hal yang terpisah. Namun, baik dan buruk itu eksis dalam kehidupan manusia, maksudnya godaan untuk melakukan perbuatan buruk selalu muncul. Ketika seseorang menjadi pejabat dan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan buruk (korupsi), maka hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja. Oleh sebab itu, simpulan Archie Bahm, "Maksimalkan kebaikan, minimalkan keburukan" (Bahm, 1998: 58).

Kedua, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi sehingga mereka kehilangan arah. Dekadensi moral itu terjadi Ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Contohnya dekadensi moral, antara lain penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran di kalangan para pelajar. Kesemuanya itu menunjukkan lemahnya tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah-sekolah.

Ketiga, pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media, seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga (PRT), penelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan lain-lain. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum

berjalan maksimal. Oleh karena itu, di samping diperlukan sosialisasi sistem etika Pancasila, diperlukan pula penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundang-undangan tentang HAM.

Keempat, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Masyarakat Indonesia dewasa ini cenderung memutuskan tindakan berdasarkan sikap emosional, mau menang sendiri, keuntungan sesaat, tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Contoh yang paling jelas adalah pembakaran hutan di Riau sehingga menimbulkan kabut asap. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang menindak tegas para pelaku pembakaran hutan, baik pribadi maupun perusahaan yang terlibat.

5. Pengaruh Globalisasi Terhadap Jiwa Nasionalisme Generasi Muda

Di Era Globalisasi dengan ciri-ciri keterbukaan dan ketergantungan antar negara membuat negara tidak mengenal batas-batasnya. Akibat saling keterbukaan dan ketergantungan dengan arus informasi dan telekomunikasi dalam waktu dekat persaingan internasional akan semakin ketat, terutama pada bidang ekonomi. Khusus untuk Indonesia, globalisasi semacam ini tidak hanya ditujukan untuk kepentingan dalam negeri, tapi juga untuk kepentingan global. Selain itu, dari segi keuntungan domestik, pengaruh globalisasi ini dapat memberikan pola pikir global dan perilaku kompetitif kepada masyarakat, suka bekerja keras, memiliki etos kerja, berkreasi serta mau belajar dan berkembang untuk meningkatkan keterampilan dan kinerja kerja.

Globalisasi pada hakikatnya merupakan proses pengusulan ide yang kemudian diikuti oleh negara lain, negara-negara tersebut akhirnya

mencapai kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi negara-negara di dunia. Globalisasi terjadi di semua bidang kehidupan, seperti ideologi, politik, ekonomi sosial budaya, pertahanan negara dan keamanan. Dalam era globalisasi saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi memegang peranan penting. Arus globalisasi yang dengan cepat memasuki masyarakat Indonesia, tentu sangat berpengaruh di kalangan generasi muda. Sebagai proses globalisasi terjadi dalam dua dimensi interaksi antar negara, yaitu dimensi ruang dan waktu. Ruang semakin berkurang, waktu semakin dipersingkat dalam interaksi dan komunikasi skala dunia.

Globalisasi terjadi di semua bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan negara, keamanan dan lain-lain. Selain itu, perkembangan teknologi dan komunikasi yang pesat menjadi factor pendukung utama perkembangan globalisasi. Adanya globalisasi telah sangat mempengaruhi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Globalisasi juga mempengaruhi berbagai bidang. Dari perspektif bidang politik, globalisasi sangat berpengaruh pada sektor pemerintahan. Pemerintahan berjalan secara terbuka dan demokratis. Jika pemerintah dijalankan secara jujur dan demokratis pasti akan berdampak positif bagi perkembangan suatu negara, namun jika terjadi sebaliknya pasti akan menimbulkan konflik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jika dilihat dari bidang ekonomi di era pasar bebas saat ini yang artinya terbukanya pasar internasional yang dapat memberikan kesempatan kerja yang tentunya akan meningkatkan devisa negara. Di bidang sosial dan budaya, globalisasi terikat untuk memungkinkan generasi muda Indonesia berkembang dengan cara berpikir yang baik, dan meningkatkan etos kerja yang tinggi, dengan meniru negara-negara maju. Seiring kemajuan suatu bangsa akan meningkatkan rasa nasionalisme suatu bangsa.

Selain perkembangan yang positif, globalisasi juga dapat berdampak negatif, bahkan berdampak pada keutuhan suatu bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain :

- 1) Globalisasi dapat membuat masyarakat Indonesia percaya bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran, hal ini jika dibiarkan akan berdampak pada pemahaman generasi muda terhadap ideologi bangsa, dan akan menyebabkan kurangnya rasa nasionalisme dikalangan generasi muda Indonesia.
- 2) Di bidang ekonomi, pengaruh globalisasi bagi bangsa Indonesia, khususnya generasi muda adalah berkurangnya rasa cinta pada produk dalam negeri sendiri, mereka lebih bangga menggunakan atau membeli produk dari negara lain dari pada produk negaranya sendiri.
- 3) Globalisasi juga mempengaruhi kesenjangan sosial antar masyarakat, yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin terpuruk.
- 4) Generasi muda bangsa Indonesia banyak meniru gaya kebaratbaratan, dan melupakan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia.

Sikap individualisme yang tinggi di kalangan masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, seperti ketidakpedulian terhadap orang lain. Jika semua ini dibiarkan, menyebabkan krisis moral bagi generasi muda, bahkan dapat menimbulkan perilaku anarkis di kalangan rekan senegara Indonesia Untuk meningkatkan jiwa nasionalisme generasi muda maka perlu dilaksanakan pendidikan karakter melalui pengajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan perguruan tinggi. Dengan menanamkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, dan menanamkan jiwa nasionalisme dikalangan generasi muda harapan bangsa dan negara, menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila dan makna Undang Undang Dasar 1945, dan menanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa, meningkatkan jiwa nasionalisme yang tinggi dan mencintai produk Indonesia. Pada saat ini, dalam rangka meningkatkan moralitas generasi muda harapan bangsa untuk meningkatkan semangat nasionalisme, maka permasalahan yang harus diselesaikan adalah membentuk mentalitas generasi muda yang

mencintai negerinya dan rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Krisis multidimensi yang dihadapi negara Indonesia saat ini, ditambah dengan krisis ekonomi, dapat dengan mudah menimbulkan konflik antarnegara. Hal ini terjadi sebab faktor keterpurukan dan kegoncangan psikologis masyarakat Indonesia.

Oleh sebab itu, perlu ditanamkan kecintaan pada tanah air dan bangsa pada generasi muda warga negara Indonesia, melalui Pendidikan Kewarganegaraan dilingkungan sekolah dan Perguruan Tinggi.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pancasila dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan sebab merupakan suatu sistem yang membentuk satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan satu dengan yang lain yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Implementasi Pancasila sebagai sistem etika dapat terwujud apabila generasi muda dapat ikut serta menerapkan nilai-nilai yang ada dalam pancasila dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh sebab itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara, seperti korupsi (penyalahgunaan kekuasaan) dapat diminimalkan.

F. Acknowledgment

None.

G. Declaration of Conflicting Interests

The authors declare that there is no conflict of interest in this research or the publication of this research.

H. Funding Information

None

I. References

- Darmadi. 2020. *Apa Mengapa Bagaimana Pembelajaran Pendidikan Moral Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn)*. Jakarta: An1mage.
- Gesmi, Hendri. 2018. *Buku Ajar Pendidikan Pancasila*. Ponorogo: Uwais.
- Handoyo. 2016. *Etika Politik Edisi Revisi*. Semarang: Widya Karya.
- Nurdin. 2017. *Etika Pemerintahan*. Lampung: Lintang Rasi Aksara.
- Paristiyanti Nurwarrdani, Hestu Yoga Saksama. 2016. *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: RISTEKDIKTI.
- Putri, F. S., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila sebagai Sistem Etika. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 3(1), 176-184.
- Widdy Yuspita Widyanignrum. (2019). Menumbuhkan Nilai Kesadaran Pancasila di Kalangan Generasi Muda. *Jurnal JISIPOL*, 3(3), 69.
- Winarno. 2016. *Paradigma Baru Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Bumi Medika
- Ysh Soegeng. 2016. *Etika Pancasila Nilai-nilai Pembentuk Karakter*. Yogyakarta: Magnum.
- Zenn Mutaqin, Wahyun. (2019). Pemahaman dan Implementasi Ideologi Pancasila di Kalangan Generasi Muda. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan* ,7 (2), 27-35.

This page was intentionally left blank.